

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Indra Suyoto Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia

ABSTRAK

Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan bagi setiap organisasi baik disektor swasta maupun sektor publik. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi tolak ukur dalam melihat apakah kinerja yang terjadi dalam sebuah institusi dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat determinan dalam menciptakan sebuah laporan keuangan yang lebih berkualitas karena salah satu syarat bagi sebuah laporan keuangan adalah memiliki informasi yang memadai dan dapat dipahami bagi setiap pemakai, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan harus lebih memperhatikan beberapa faktor pendukung. Dalam penelitian ini, mencoba untuk melihat faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap terciptanya sebuah laporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga dapat memudahkan para pemakaiannya. Penelitian ini menggunakan tiga faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yakni kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengendalian internal dalam organisasi yang kemudian akan di olah dengan bantuan program statistik dalam bentuk SmsrtPLS. Setelah dilakukan uji analisis terhadap ketiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis SmartPLS diperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang diperoleh yakni sebesar 5,254386. Sehingga dapat diindikasikan bahwa semakin besar kompetensi seorang pegawai dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk faktor pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mana dapat dilihat dari nilai t hitung yang diperoleh yakni sebesar 2,201480. Sedangkan untuk sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh sebesar 0,977357. Dan untuk ketiga faktor menggunakan tolak ukur signifikan sebesar 1,96.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia,.

ABSTRACT

Preparation and financial reporting is an obligation that is done for every organization both private sector and public sector. This is because the financial statements serve as a benchmark to see if the performance is happening in an institution can run well and properly. This study was conducted to see the determinant in creating a higher quality financial statements because one of the requirements for a financial statement is to have adequate information and can dipahami for each user, so that in the preparation of financial statements should be more attention to several contributing factors. In this study, trying to see what factors can influence the creation of a higher quality financial statements so as to facilitate its user. This study uses three factors that are considered to influence the improvement of the quality of the financial statements of the competence of local government human resources, utilization of information technology, as well as the internal control system within the organization which will then be processed with the help of statistical programs in the form SmsrtPLS. After testing the analysis of the three factors used in this study by using analytical tools SmartPLS result that the competence of human resources

has a positive and significant impact on the quality of financial reports of local government, it can be seen from the value of t obtained which is equal to 5,254,386. So it may be indicated that the greater the competence of an employee can impact the quality of financial reporting. As for the use of information technology factors also influence a positive and significant impact on improving the quality of local government financial statements which can be seen from the value t obtained which is equal to 2.201480. As for the internal control system has no effect on the quality of government financial statements it can be seen from the values obtained by 0.977357. And the third factor to use significant benchmark by 1.96.

Keywords: quality of financial reporting, internal control systems, human resource competencies,.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dalam laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Indriasari, 2008). Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi 4 karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu Sistem Pengendalian Internal. Hasil pemeriksaan audit BPK pada laporan Semester I tahun 2012 ditemukan 4.369 kasus tentang kelemahan sistem pengendalian internal pada pengelolaan pemerintah daerah, berikut data kelemahan sistem pengendalian internal tersebut :

Tabel 1. Kelompok Temuan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Yang Mengakibatkan		
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.791
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	1.739
3	Kelemahan struktur pengendalian internal	839
	Jumlah	4.369

Sumber: www.bpk.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Dengan sistem pengendalian internal yang baik maka akan dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan daerah yang mempunyai kualitas yang baik atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) dengan mengambil objek pada pemda Cianjur, dimana dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah, SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang kompeten tersebut akan lebih mudah memahami logika akuntansi dengan baik. Pembuatan laporan keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang membuat laporan keuangan tersebut memahami akuntansi.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual. Tingkat pendidikan juga sering menjadi indikator yang menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Hariandja (2002:169) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang pegawai dapat meningkatkan daya saing organisasi dan memperbaiki kinerja organisasi.

Pengalaman kerja di dalam organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang memiliki kemampuan yang lebih. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Foster, 2001:40). Hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang pada intinya pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara wajib menyusun dan melaporkan laporan – laporan keuangan yang tercantum dalam PP 71 tahun 2010 atau lebih dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu: Arifianti (2011) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Masih adanya perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemberian WTP DPP pada Kota Samarinda karena ada beberapa catatan yang diberikan BPK yaitu pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak sesuai ketentuan, pengelolaan penagihan angsuran penjualan aset belum memadai, pendapatan jasa giro dan bunga deposito di BRI dikenakan pajak penghasilan serta pembayaran honorarium pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai ketentuan.

Meskipun BPK Kaltim masih menemukan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, namun setidaknya penyajian LKPD Kota Samarinda semakin membaik. Predikat WTP DPP ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar dan sesuai aturan sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis membuat rumusan masalah diantaranya Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Teori kegunaan-keputusan informasi sangat relevan, karena Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari SFAC No.2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Staubus (2003) dalam Kiswara (2011) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman, 2008). Hal ini dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1 *Financial Reporting Standards-Setting Structure*



(Freeman, 2008)

SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). Di Indonesia sampai dengan saat ini, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2005 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *SFAC No. 2*. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Freeman (2008) dalam Mainardes, E.W., Alves, H. and Mario Raposo (2011) menjelaskan *Stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang *Stakeholder theory*, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick *et al.*, 1992 dalam Mainardes *et al.*, 2011).

Menurut Zimmerman (1990) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agen*, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan *agen* dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah *agen* mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah *agen* mereka. Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton; 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Mengacu pada teori agensi, akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Keuangan Pemerintah Daerah

Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan ini terkait terbitnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Prasajo et al. (2006), desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, regulasi pokok untuk desentralisasi tercakup dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya tiga buah paket undang-undang pada tahun 2003 dan 2004. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan dasar dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia.

Keuangan daerah menurut PP No. 58 tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Standar akuntansi pemerintah dalam PP ini dinyatakan dalam bentuk Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo:2009:20). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Wibowo (2011:95) mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam

pekerjaannya.

Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat pegawai dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang (Zuliarti, 2012).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson (2005:196) mendefinisikan Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database*), jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Zuliarti, 2012).

Sistem Pengendalian Internal

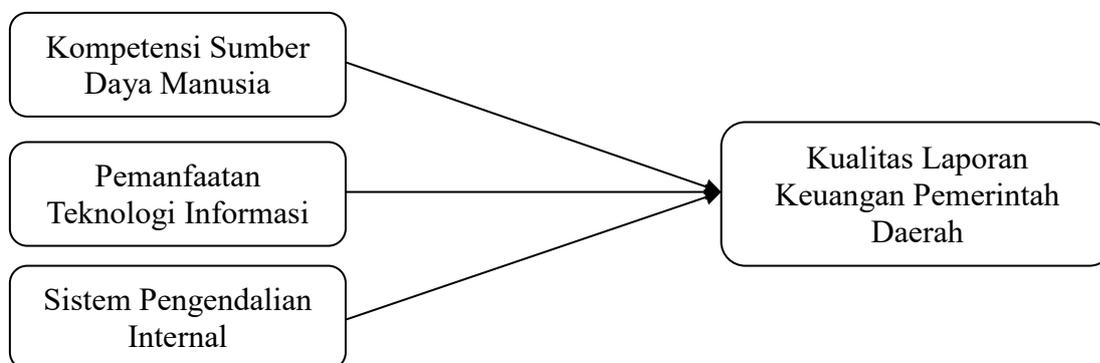
Menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) "Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya." Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Menurut Wilkinson *et al.*, (2000) dalam Indriasari (2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) Otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d)

Pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) Penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

Kerangka Konsep dan Model Penelitian

Gambar 2. Kerangka Pikir



Hipotesis

Dengan mengacu pada gambar kerangka pikir diatas maka dapat di tarik hipotesis dalam

penelitian ini adalah :

- H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah secara khusus pada Kota Samarinda. Faktor-faktor yang diteliti adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikat, peneliti menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel bebas menggunakan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

Menurut Sugiyono (2011:389) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda. Pemilihan ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Samarinda karena pada tahun 2014 kota Samarinda dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 35 SKPD yang terdapat di wilayah Kota Samarinda.

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. Sehingga dengan mengacu pada metode pengambilan sampel, sehingga yang menjadi sampel adalah Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 3 orang yang menjadi responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Studi kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Research*). Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (*5-point likert scale*).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS), karena indikator yang dipakai lebih dari satu. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.96.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirim sebanyak 105 kuesioner yang diantar langsung ke 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda dengan responden sebanyak 105 orang. Pengiriman kuesioner dilakukan pada tanggal 15 Juni 2015. Setelah 3 minggu kuesioner yang kembali hanya sebanyak 78 lembar kuesioner.

Tabel 2. Nilai Cross Loading

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,744131	0,256936	0,020771	0,470462
X1.2	0,278809	0,220617	-0,117578	0,176270
X1.3	0,720717	0,076531	0,161489	0,455659
X2.1	-0,065435	0,151856	0,044768	0,056252
X2.2	0,143712	0,444936	0,110412	0,164818
X2.3	0,233944	0,919929	0,078436	0,340770
X2.4	0,106998	0,290171	-0,033971	0,107488
X2.5	0,122687	0,451794	-0,031224	0,167356
X2.6	0,077217	0,349869	0,055785	0,129604
X3.1	-0,057671	0,063335	0,233621	0,068390
X3.2	-0,117802	-0,166555	-0,724054	-0,211962
X3.3	0,036272	-0,059165	0,073591	0,021543
X3.4	-0,043286	0,004812	-0,024756	-0,007246
X3.5	-0,004086	-0,042345	0,501536	0,146818
X3.6	0,028253	-0,099717	0,387754	0,113513
X3.7	0,002170	0,049574	-0,103790	-0,030384
Y.1	0,557994	0,328118	0,277981	0,892250
Y.2	0,443141	0,300613	0,271222	0,747986
Y.3	0,336085	0,140501	0,024734	0,448021

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari hasil uji analisis yang dapat dilihat dari tabel diatas, dapat menjelaskan hubungan antara indikator terhadap variabel yang dituju. Dalam pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling bootstraping. Dimana statistik uji yang digunakan adalah uji t. Pengujian dilakukan pada taraf signfikansi ($\alpha= 5\%$), apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1.96), maka indikator tersebut merupakan indikator yang valid dalam mengukur konstruknya.

Tabel 3. Nilai hasil uji dengan PLS nilai indikator terhadap variabel

	Weight	T Statistics	Standard Deviation	Keterangan
X1.1 -> X1	0,632596	3,289654	0,192299	t-stat > t-tabel
X1.2 -> X1	0,305596	1,839082	0,166167	t-stat < t-tabel
X1.3 -> X1	0,616141	4,578855	0,134562	t-stat > t-tabel
X2.1 -> X2	-0,184580	0,686797	0,268755	t-stat < t-tabel
X2.2 -> X2	0,175669	0,635742	0,276321	t-stat < t-tabel
X2.3 -> X2	0,873857	3,063283	0,285268	t-stat > t-tabel
X2.4 -> X2	0,021937	0,076342	0,287356	t-stat < t-tabel
X2.5 -> X2	0,095395	0,263800	0,361620	t-stat < t-tabel
X2.6 -> X2	0,275867	1,062177	0,259718	t-stat < t-tabel
X3.1 -> X3	0,286307	0,878293	0,325981	t-stat < t-tabel

X3.2 -> X3	-0,762050	1,328101	0,573789	t-stat < t-tabel
X3.3 -> X3	0,165923	0,662083	0,250608	t-stat < t-tabel
X3.4 -> X3	0,146528	0,454993	0,322045	t-stat < t-tabel
X3.5 -> X3	0,583256	1,265297	0,460964	t-stat < t-tabel
X3.6 -> X3	0,215438	0,707307	0,304589	t-stat < t-tabel
X3.7 -> X3	0,031765	0,125951	0,252205	t-stat < t-tabel
Y.1 -> Y	0,655468	2,960551	0,221401	t-stat > t-tabel
Y.2 -> Y	0,381056	1,823109	0,209014	t-stat < t-tabel
Y.3 -> Y	0,290463	1,205722	0,240903	t-stat < t-tabel

Sumber : data telah melalui proses olah

Dari hasil uji analisis yang dapat dilihat pada tabel diatas, dapat diketahui terdapat beberapa hubungan antara indikator kepada konstruk memiliki nilai berada dibawah atau lebih kecil dari t-tabel, hanya terdapat beberapa hubungan indikator kepada konstruk yang memperoleh nilai lebih atau diatas t-tabel dalam hal ini lebih besar dari 1,96.

Tabel. 4. Hasil Uji analisis terhadap hipotesis

	Weight	T Statistics	Standard Deviation	Keterangan
X1 → Y	0,560711	5,254386	0,106713	t-stat > t-tabel
X2 → Y	0,193860	2,201480	0,088059	t-stat > t-tabel
X3 → Y	0,232024	0,977357	0,237399	t-stat < t-tabel

Sumber : Hasil Olah data

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tiga variabel independen yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen, dimana variabel X1 (Kompetensi sumber daya manusia) dan variabel X2 (Pemanfaatan teknologi informasi) yang memperoleh nilai diatas 1,96 sedangkan untuk variabel X3 (Sistem pengendalian internal) memperoleh nilai dibawah 1,96.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji analisis dengan menggunakan program PLS diperoleh hasil t-statistik sebesar 5,254386, yang tentunya lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kompetensi sumber daya manusia telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) penempatan pegawai sesuai bidang ilmu, (2) memiliki pegawai yang profesional baik dilihat dari masa kerja atau skilnya, (3) adanya pembagian tanggungjawab kepada setiap pegawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Celvina Widyanigrum dan Rahmawati (2010), penelitian oleh Roviyantje (2011) dan Tantri (2011) yang mana dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil uji analisis dengan penggunaan PLS menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t- hitung sebesar 2,201480 dengan signifikansi 1,96 dan tingkat kepercayaan 0,05. Sehingga dengan demikian untuk peningkatan kualitas sebuah laporan keuangan salah satu faktor pendukung adalah harus dapat memanfaatkan teknologi, karena perkembangan teknologi akan berbanding lurus dengan semakin mudahnya pekerjaan seseorang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Selviana Widyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil uji analisis menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t-statistik sebesar 0,977357 dengan signifikansi 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) yang mana dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, yang dalam penelitian tersebut dilakukan di lingkup Pemda Cianjur). Serta berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantriaani Sukmaningrum Puji Harto (2005) yang mana dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap kualitasn informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten dan kota semarang sebagai objek penelitiannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang diproksikan dengan penempatan karyawan sesuai dengan skill, masa kerja karyawan, serta pemberian tanggung jawab terhadap karyawan menjadi indikator pembentuk dan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang perlu untuk selalu diperhatikan dalam tata kelola sebuah instansi khususnya dalam menciptakan laporan keuangan yang lebih berkualitas lagi, sehingga kinerja akan dianggap baik pula. Untuk variabel sistem pengendalian internal belum mampu untuk memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini. Hal ini dimungkinkan indikator yang digunakan belum mampu untuk menjadikan sistem pengendalian internal menjadi sebuah variabel yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Diharapkan kedepannya kepada pihak yang memiliki kompeten dibidang tata kelola keuangan baik dari segi pemerintahan atau dari sisi lembaga diluar pemerintah untuk selalu memberikan masukan dan pembaharuan dalam hal melakukan tata kelola keuangan sampai dengan penyusunan dan pelaporan keuangan dan yang terpenting lagi mengenai penerbitan sebuah aturan yang menjadi acuan untuk setiap organisasi khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya dihimbau dapat memperluas lagi penelitian, misalnya dengan mencoba menambah indikator atau variabel lain yang dianggap dapat memberikan sebuah pengaruh. Selain itu juga mencoba untuk wilayah yang lebih luas karena penelitian ini hanya mengambil objek untuk wilayah kota samarinda. Yang tentunya adat istiadat dan sistem yang berjalan diperoleh dari satu sumber, untuk peneliti selanjutnya mungkin bisa membandingkan antara wilayah yang berbeda.

REFERENSI

- Afriyanti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007). *Petunjuk Tehnis Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga*.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Cheng, Rita Hartung 1992, 'An Empirical Analysis of Theories on Factors Influencing State Government Accounting Disclosure', *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 11, issue 1, spring, pp. 1-42
- Celviana, Widianingrum, Rahmawati, 2010. *Pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntans, studi empiris*, di pemda subosukawonosseraten, Simposium Nasional Akuntansi XII Purwakarta.
- Evans, J., Patton, J., 1987. Signaling and monitoring in public sector accounting. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130–158.
- Foster, Bill. 2001. *Pembinaan untuk Peningkatan Kinerja Karyawan*. PPM : Jakarta
- Freeman, Robert J., and Shoulder, Craig D.. (2008). *Governmental and Nonprofit Accounting Theory and Practice*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson International Edition
- Hariandja, M.T.E, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta.
- I Gusti Agung Rai. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Indriasari, Desi (2008). "*Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*". Kumpulan Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak 2008
- Kiswara, Endang, 2011, *Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda*. PhD thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Moekijat. Prasojo. 2011. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* Bandung: Remadja Karya.
- Mainardes, E.W., Alves, H. and Mario Raposo. 2011. "Stakeholder theory: issue to resolve". *Management Decision* vol 49 No. 2, 2011, 226-252.
- Raposo, Mário. 2011. *Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity*. *Psicothema* 2011. Vol. 23, n° 3, pp. 453-457. ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Tuti Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star- Study & Accounting Research* Vol Xi No 1 2014 ISSN: 1693-4482.
- Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective. *The Accounting Review*. 65:131-156.
- Wibowo. 2011. *budaya organisasi : sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wilkinson Joseph W. (2005), *Sistem Akuntansi dan Informasi*, Penerbit Erlangga.
- Wilkinson, Josep W. Et al, 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*, 4 Edition, John Willey & Sons Inc, New York-USA.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas MuhMuria Kudus.